

---

**DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL  
(Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement ) Tahun 1993)**

Oleh

Aswir F. Badjodah<sup>1</sup>, Mahmud Husen<sup>2</sup>, Saiful Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email: <sup>3</sup>[saifulahmad1112@gmail.com](mailto:saifulahmad1112@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 13-10-2021

Revised: 16-11-2021

Accepted: 22-11-2021

**Keywords:**

Konsensus, Konflik

Palestina–Israel, Perjanjian

Oslo 1993

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan menjelaskan prospek penyelesaian (konsensus) konflik Palestina – Israel studi kasus Perjanjian Damai Oslo 1993, dengan melihat latar belakang dan implikasinya bagi Rakyat Palestian). Penelitian ini membahas Sejauhmana prospek penyelesaian konflik Palestina–Israel dan implikasinya bagi rakyat Palestina di masa datang. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis studi Pustaka, yang merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian damai Oslo 1993 (Oslo Agreement) tidak dapat diimplementasikan, bahkan menambah intensitas serta kompleksitas konflik Palestina – Israel. Disamping itu, perjanjian damai Oslo 1993 tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi proses terjadinya konsensus dalam konflik, bahkan intensitas konflik meningkat seiring dengan munculnya perjanjian-perjanjian baru yang bernasib hampir sama dengan perjanjian Oslo 1993. Maka, dapat dikatakan harapan rakyat Palestina untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa Israel dan saling menghormati hak-hak kemanusiaan sebagaimana dikehendaki Piagam PBB makin jauh dari harapan jalan damai.

---

**PENDAHULUAN**

Perang Palestina – Israel dimulai pertama kali pada tahun 1948. Perang tersebut di picu oleh rencana dunia internasional pada tahun 1937 untuk mengusulkan Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi, dimana kota Jerusalem dan Haifa tetap berada dibawah supervisi pemerintahan mandataris Inggris. Namun, apa yang terjadi proposal ini ditolak oleh kedua pihak. Alasan penolakan ini disebabkan karena Palestina dan Israel sendiri menginginkan berdirinya sebuah negara merdeka, negara yang bebas dari intervensi bangsa lain. Kemudian dalam konferensi Sufar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi nomor 181 tahun 1947 yang telah membagi

wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi. Resolusi ini memberikan peluang dan legitimasi bagi kedua pihak untuk mendirikan negara merdeka di wilayah Palestina.

Implementasi dari resolusi tersebut, maka pada tanggal 14 Mei 1948 David Ben Gourion mendeklarasikan Negara Israel. Masalah ini menimbulkan penolakan dari pihak Palestina. Wujud dari penolakan itu, pihak Palestina yang di wakili oleh Hamas dan Jihad Islami melancarkan serangan bom bunuh diri kesasaran (sistem pertahanan) strategis Israel di Jerusalem, Ashkelon, dan Tel Aviv yang terjadi pada bulan Febuari dan Maret tahun 1996. Dalam peristiwa tersebut korban yang meninggal dari pihak Israel berjumlah 60 orang (Abdul Rachman, 2002).

Atas kejadian tersebut pemimpin PLO, Yaser Arafat dengan tegas menolak berdirinya negara Israel. Namun sikap Arafat ini hanya berlangsung 40 tahun. Karena pada akhirnya tepat tanggal 15 November 1988 Yaser Arafat mengumumkan berdirinya Negara Palestina merdeka di Algeria dengan berlandaskan pada resolusi PBB nomor 181 tahun 1947. Pendirian Negara Palestina mendapat dukungan dunia internasional. Dukungan tersebut datang dari 22 negara anggota Liga Arab, 10 negara Arab dan beberapa Negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Zambia, Yugoslavia, dan Uni Sovyet. Sebaliknya nasib negara Israel berdiri hanya 1 negara yang mengakuinya, yaitu Turki jika dibandingkan dengan Palestine, maka lebih legitimasi adalah Palestina.

Perang yang akan memasuki tahun ke-73 dari tahun 1948 sampai dengan tahun 2018 merupakan bentuk perlawanan dari bangsa Palestina yang merasa hak-haknya dirampas. Perlawanan ini bertujuan membebaskan diri dari bangsa penjajah. Walaupun peperangan ini tidak berimbang dari segi peralatan perang dan jumlah pasukan yang disediakan. Pihak Palestina berjumlah 24 ribu, sementara pihak Israel 70 ribu. Tapi faktanya tidak membuat gentar bangsa Palestina.

Sebagai contoh sebagaimana perlawanan bangsa Palestina pada tahun 1948 yang diwakili oleh pergerakan Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan tanah Palestina dari penjajarah Israel. Tercatat bahwa pada Oktober 1948, Imam Syahid Hasan Al-Banna menyukarelakan darah 10 ribu IM sebagai kloter pertama dalam perang Palestina - Israel. Imam Syahid Hasan Al-Banna selaku pemimpin IM menyerukan kepada anggotanya untuk membebaskan wilayah Palestina dari penjajahan Israel. Seruan ini kemudian dapat dijadikan sikap politik IM untuk terlibat dalam perang Palestina - Israel. Misalnya perang Tabbah di Gaza, pengepungan militer Mesir di wilayah Paluja, peperangan al-Quds, al-Khalil, Baitlehem, Ramat Rahil, merebut kembali Mar Ilyas, Shuwr Bahr, mempertahankan "Tabbah" Yaman yang disebut "Tabbah Ikhwanul Muslimin".

Menurut M. Muhammad Shaleh (2002:70-71), ketidakseimbangan alat perang yang dialami pihak Palestina mengakibatkan kekalahan. Disamping itu ada faktor lain yang melatarbelakangi kekalahan di pihak Palestina, yaitu masih belum bersatunya kelompok-kelompok pejuang Palestina untuk melawan pihak Israel. Sementara itu menurut Almuzammil Yusuf (2001:90) bahwa kekalahan ini diakibatkan karena sikap dan dukungan Inggris menyetujui deklarasi Bolfour tahun 1917 dan tekadnya mengadopsi kebijakan yang mendukung Israel dalam upayanya menguasai wilayah Palestina serta melawan pemberontakan warga Palestina yang menghalangi upaya Israel.

Akibat dari kekalahan ini, sebagian besar wilayah Palestina harus dikuasai oleh bangsa Israel. Kenyataan ini tidak membuat warga Palestina merasa kecewa karena perjuangan akan terus dikobarkan sampai pihak Israel mundur dari wilayah Palestina. Dan cara-cara yang akan digunakan adalah peperangan dan perundingan.

Salah satu cara dalam penyelesaian konflik adalah perang itu sendiri. Perang Palestina – Israel yang pertama pecah pada tahun 1948, dan berlanjut terus dengan perang 1957, 1963, 1967, seterusnya 1973, 1982, 1993, selanjutnya 2002, 2003, 2013 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan cara lain yang ditempuh dalam penyelesaian konflik adalah perundingan. Dan perundinganpun terus diupayakan oleh kedua belah pihak, hal ini dilakukan karena konflik ini telah memakan korban jiwa yang cukup banyak.

Jumlah korban dari kedua belah pihak sebagaimana menurut Satrio Arismunandar dalam Qardhawi (1996:65). Bahwa korban dari pihak Palestina kurang lebih 15.384 orang, terhitung tahun 1948-1996 atau kurang lebih 4.795 - 7.495 orang dari tahun 1987-1989 dan pihak Israel kurang lebih 282 orang dari tahun 1968-1981. Sedangkan menurut Z. A. Maulani (2002:82) pada tahun 1993 korban di pihak Palestina berjumlah 261.000 jiwa, 186.000 orang terluka, dan 161.000 orang cacat untuk seumur hidup. Lagi pula ditambah dengan pengusuran dari kamp-kamp yang dikuasai Israel berjumlah 5,4 juta jiwa.

Dalam konteks ini, adalah menindaklanjuti ide Land for Peals sebagaimana tersirat dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tanggal 29 November tahun 1947 dan diperkuat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 1967 serta resolusi 338 tahun 1971. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ini dalam rangka mendorong kedua pihak yang bertikai untuk melakukan perundingan damai sebagai solusi alternatif dari tercapainya konsensus bersama.

Salah satu komitmen yang telah dilakukan oleh kedua pihak yaitu mengadakan perjanjian damai Oslo 1993 untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan menuju perdamaian. Ketika perjanjian damai Oslo 1993 ditandatangani, masyarakat Palestina tidak percaya bahwa itu akan dilaksanakan oleh Israel. Karena ada perjanjian sebelumnya yang selalu dilanggar Israel. Dan dalam perjanjian damai Oslo 1993, tidak juga mengangkat persoalan mendasar yang diinginkan oleh rakyat Palestina, yaitu status kota Jerusalem, masalah pengungsi Palestina, dan pemukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza.

Implementasi dari kesepakatan perjanjian damai Oslo 1993, dapat dibagi menjadi tiga tahapan yang berlangsung selama 5 tahun. Dalam tahapan pertama, Oslo 1993 akan menyerahkan wilayah jalur Gaza dan kota Jericho kepada Palestina. Tahapan kedua, Oslo pada November 1996 akan menyerahkan wilayah Tepi Barat (Kota Hebron) kepada Palestina. Tahapan ketiga, yakni Oslo 4 Mei 1999 akan menyerahkan Jerusalem Timur dan pemukiman Yahudi serta pemulangan pengungsi Palestina dan ditandai dengan berdirinya negara Palestina.

Namun ditengah-tengah berlagsungnya perjanjian damai Oslo 1993 ternyata kedua pihak tetap melakukan penyerangan, misalnya pembantaian yang dilakukan ekstrim Yahudi terhadap warga Palestina pada 25 Febuari 1994, mengakibatkan korban jiwa lebih dari 30 orang dan ratusan lain luka-luka. Sementara pihak Palestina terus membalas serangan dengan melancarkan gerakan Intifadha atau bom bunuh diri (syahidah) kesasaran strategis Israel.

Inti studi ini hanya terfokus pada perjanjian perdamaian Oslo 1993, yang sampai saat ini belum diimplementasikannya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk

mengungkap berbagai kelemahan dan keunggulan perjanjian tersebut serta faktor-faktor apa saja yang menghambat proses implementasinya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Jenis studi pustaka dalam pandangan Sugiyono merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Data diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang perjanjian damai Oslo 1993, data tentang temuan tidak dilaksanakannya isi perjanjian damai Oslo 1993 oleh bangsa Yahudi. Validasi data dilakukan melalui penggunaan kritik sumber. Kritik sumber bertujuan untuk menyeleksi atau memastikan keaslian atau kebenaran data yang diperoleh dari sumber. Kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk konsep-konsep ilmiah. Tujuan penulisan menggunakan kritik adalah untuk menyeleksi atau menjadi fakta, yang seterusnya akan digunakan sebagai objek penelitian dalam menjawab permasalahan yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Teori

Ada beberapa teori yang mungkin bisa dipakai dalam menganalisis konflik Palestina – Israel. Salah satunya konflik sosial, mengingat kasus ini dapat disoroti dari beberapa aspek: politik dan teologi. Konflik sosial sendiri – sebagaimana dikatakan Oberschall (1997) mengutip Coser – diartikan sebagai “...a struggle over values or claims to status, power, and scare resource, in wich the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise injure or eliminate rivals. Pengertian ini menunjukkan bahwa konflik sosial meliputi spektrum yang lebar dengan melibatkan berbagai konflik yang membingkainya, seperti: konflik antar kelas (social class conflict), konflik ras (ethnics and racial conflicts), konflik antar pemeluk agama (religions conflict), konflik antar komunitas (communal conflict), dan lain sebagainya.

Konflik menurut Holsti (T. May Rudi, 2002:93) adalah merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki Negara A dengan kepentingan Negara B atau Negara lainnya. Konflik mencakup tindakan diplomasi, propaganda, perdagangan, atau ancaman dan sanksi militer yang dilakukan salah satu Negara terhadap Negara lainnya. Berdasarkan sejarah konflik didunia yang terjadi sebanyak 86 konflik yang berlangsung ada 7 jenis sasaran utama atau sumber konflik yang dikemukakan oleh Holsti (1987:597-598) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Konflik territorial terbatas :

Konflik ini merupakan pertentangan tuntutan yang berkaitan dengan pemilikan sebidang wilayah khusus, atau mengelola wilayah di dalam atau di sekitar daerah perbatasan dengan Negara lain. Masalah mengenai kedaulatan minoritas etnis sering **juga** berkaitan dengan tuntutan yang diajukan oleh suatu Negara untuk mengawasi wilayah yang dikuasai oleh Negara lainnya.

2. Konflik yang berkaitan dengan komposisi suatu pemerintahan.

Adalah Amerika Serikat, Unisoviet, dan Cina terlibat langsung dalam perang saudara Laos

dari tahun 1959-1962 berkisar dalam pertentangan konsepsi mengenai siapa yang berhak memerintah Negara tersebut. Dalam perselisihan tersebut, warna ideology nampak jelas sekali.

3. Konflik yang disebabkan suatu negara berusaha mempertahankan hak territorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelngsungan hidup negaranya.

Tindakan militer Israel terhadap Negara Arab dalam perang Juni 1967 direncanakan untuk memperoleh lebih banyak wilayah perbatasan untuk mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidup negaranya. Jenis masalah seperti ini dapat diklsifikasikan sebagai strategi imperialism.

4. Konflik karena kehormatan nasional.

Pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan perbuatan yang dianggap salah. Misalnya, invasi Yunani terhadap Bulgaria pada tahun 1925, timbul karena masalah perbatasan yang melibatkan kematian dua orang tentara pengawal perbatasan.

5. Imperialism tidak terbatas.

Suatu Negara berusaha menghancurkan kedaulatan Negara lain, biasanya dengan maksud ideology, keamanan, dan perdagangan.

6. Konflik perbatasan.

Perang revolusioner yang dilakukan suatu Negara untuk membebaskan rakyat Negara lain, biasanya dilatarbelakangi alasan etnis atau ideologis.

7. Konflik yang disebabkan tujuan pemerintah untuk mempersatukan Negara terpisah.

Sedangkan cara dalam menyelesaikan salah satu konflik atau resolusinya adalah seperti yang dikemukakan oleh Holsti (dalam Rudy, 2002:98-99) adalah :

1. Melakukan penarikan tuntutan

Penyelesaiannya adalah salah satu atau kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau mendesak perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan.

2. Penaklukan

Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan diantara Negara yang bermusuhan. Menurut Coser, salah satu pihak harus diusahakan menyadari bahwa perdamaian, meski berdasarkan penyerbuan tanpa syarat jauh lebih baik daripada melanjutkan konflik.

3. Tunduk atau membentuk Deterrence (penangkalan)

Kriteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukkan kepada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar dibandingkan melakukan penarikan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut

pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar disbanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai criteria keadilan.

6. Penyelesaian Secara Damai

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain sebagainya) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru.

### **Pembahasan**

#### **Arah Kebijakan Perdamaian Dari Faksi-Faksi Yang Bertikai**

Setelah diproklamasikan Negara Israel 14 Mei 1947 dan Negara Palestina 15 November 1988, tentunya semua pihak berharap agar konflik ini akan berakhir. Karena masing-masing kelompok telah memiliki sebuah kemerdekaan yang dicita-citakan. Kemudian berbagai perundingan yang telah dilaksanakan. Sehingga kemungkinan besar, kedua bangsa ini akan hidup berdampingan dalam wilayah yang disepakati bersama. Namun ini tidak menjadi kenyataan, proses selanjutnya adalah penolakan-penolakan berbagai kesepakatan tersebut. Dengan berbagai latar belakang yang dibangun kedua pihak untuk menilai kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok yang pro dan kontra diantara kedua belah pihak. Tentunya kelompok-kelompok ini mampu membangun opini yang meyakinkan pada basis massanya. Ada tiga kekuatan politik utama menurut Adian Husaini (2002:116) yang berpengaruh di Palestina, yaitu :

1. Kelompok nasionalis, kelompok ini dipimpin oleh Yasser Arafat (PLO) dan Fatah. Kelompok ini menolak Islam politik dan mengadopsi pemikiran barat. Garis perjuangan dari kelompok ini adalah memperjuangkan Negara Palestina di Westbank dan Gaza melalui perundingan dengan Israel. Dan kelompok ini menolak berdirinya Negara Islam, yaitu Negara yang menjadikan Islam sebagai system ideologi Negara, tapi satu menjadikan kapitalisme sebagai system bernegara.
2. Kelompok oposisi nasionalis kiri, kelompok ini lebih sekuler tapi mereka menolak pemikiran barat dan kapitalisme. Dan mereka juga menolak kesepakatan Oslo 1993. Kelompok ini menganut paham komunisme atau sosialisme, dan menyetujui berdirinya Negara Palestina, mendukung perjuangan rakyat Palestina serta menolak berdirinya Negara Islam.
3. Kelompok Hamas dan Jihad Islam, kelompok ini menggunakan nilai-nilai politik Islam sebagai arah dan landasan perjuangannya serta berusaha mendirikan Negara Islam. Mereka juga menolak perdamaian dengan Israel, perjanjian damai Oslo 1993, keberadaan Negara Israel di wilayah Palestina. Hamas juga menolak pendirian kemerdekaan Negara Palestina yang diumumkan oleh Yasser Arafat (PLO), karena menurut pimpinannya adalah Negara Palestina tersebut tidak akan menempati seluruh wilayah Palestina.

Perjuangan ketiga kelompok ini mempengaruhi peta politik di Palestina. Sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan dapat mempengaruhi pada seluruh proses perjanjian damai dengan Israel. Kelompok ini mampu menggalang kekuatan dan memobilisasi massa dalam mengusir penjajah Israel. Sementara hubungan antara ketiga kelompok ini sangat renggang dan sangat sulit untuk dipertemukan dalam meja perundingan. Dan yang mendominasi peta politik di Palestina adalah kelompok Hamas dan Jihad Islam yang dianggap rakyat Palestina sebagai kelompok yang sungguh-sungguh berjuang untuk membebaskan wilayah Palestina dari kekuasaan Israel, hal ini terlibat dengan aksi bom bunuh diri yang mereka lakukan dalam menghadapi bangsa Israel. Bukti kecintaan masyarakat pada kelompok Hamas adalah “ketika 1991 Hamas memenangkan pemilu di Tepi Barat (Hebron)”. Sedangkan kelompok Yasser Arafat dianggap sebagai kaki tangan bangsa Israel karena mengakui eksistensi negara Israel dan hak bangsa Israel di Palestina serta menyetujui berbagai perjanjian damai yang pada hakekatnya bukan kepentingan masyarakat Palestina. Tapi lebih cenderung pada kepentingan kelompoknya.

Sementara dipihak Israel menurut Musthafa Abd. Rahman (2002:122-123) bahwa terbagi dalam dua kubu, yaitu kubu kiri dan kubu kanan. Kubu kiri, terdiri atas dua partai sekuler utama, yaitu partai buruh dan Meretz, ditambah sejumlah partai kecil, seperti Ratz, Mapam, Shinui, Hadash, Democratic Arab Party. Kubu ini diwakili oleh Shimon Peres sebagai kelompok akstrim kiri yang mengambil kebijakan politik terhadap masalah Palestina sangat kompromistis dan moderat. Kebijakannya selalu menghindari penggunaan kekuatan militer. Tapi disamping itu tetap menolak kebijaksanaan membebaskan tawanan Palestina dan menganut kebijaksanaan mengepung jalur Gaza dan Tepi Barat. Setiap muncul aksi kekerasan kubu ini memilih paham sosialis.

Kubu Kanan, terdiri atas tiga partai sekuler yaitu Likud, Tzomet dan Moledet, serta sejumlah partai agama, seperti mafdal, Ashkenazi Ultra Ortodoks Agudat Israel, dan Sephardi Ortodoks Shar. Kubu ini diwakili oleh Ariel Sharon yang dikenal sebagai kelompok garis keras di Israel. Kubu ini memilih paham Zionis Revisionis. Dalam kebijakan politiknya terhadap masalah Palestina sangat tidak manusiawi, dalam pernyataan bahwa menolak pemberian konsensi pada Palestina, dalam upaya pencapaian kesepakatan damai dan mengakhiri konflik. Jalan yang ditempuh dalam penyelesaian konflik ini adalah menggunakan kekuatan senjata. Disamping program perdamaian yang ditawarkan adalah menyerahkan 42 persen wilayah Tepi Barat pada Palestina, tanpa mengusik satu unit pun kompleks pemukiman Yahudi, kota Jerusalem tetap bersatu, tidak ada hak kembali bagi pengungsi Palestina.

Adian Husaini (2002:184) mengatakan bahwa dalam peta perpolitikan di Israel kelompok ini kemudian saling bersaing dalam merebut simpati masyarakat untuk meraih jabatan perdana menteri. Antara kedua kubu ini tidak ada yang terlalu dominan. Ini terlihat dalam pemilu yang dilaksanakan di Israel. Pemilu tahun 1949 sampai tahun 1977 kubu kiri (Buruh) mendominasi perpolitikan di Israel. Sementara kubu kanan (Likud) memenangkan pemilu pada tahun 1977 sampai 1992. Sehingga kendali pemerintahan berada pada partai Likud. Dalam konteks ini, maka perpolitikan di Israel tergantung pada isu yang ditawarkan masing-masing kubu, dengan mempertimbangkan situasi nasional negaranya.

Kelompok inilah, yang kemudian dapat menentukan arah kebijakan politik suatu Negara. Apakah perjanjian damai diterima atau ditolak tergantung pada faksi-faksi yang berada dalam Negara tersebut. Hal ini dikemukakan William D. Coplin (Adian Husaini,

2002:18) bahwa ada tiga factor yang mempengaruhi jalannya perjanjian damai atau pengambilan keputusan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Namun, kondisi dan persepsi elit politik sebagai actor pengambil keputusan, sehingga merupakan factor kunci. Dengan demikian kedua kelompok ini memiliki signifikansi dalam merubah arah kebijakan suatu Negara. Sehingga proses perundingan yang berjalan tersendat-sendat ini kemungkinan dipengaruhi oleh kelompok tersebut.

#### **Upaya Perdamaian Yang Pernah Dilakukan**

Pada tanggal 22 November 1967, Dewan Keamanan PBB secara bulat mencetuskan resolusi 242, yang menetapkan prinsip-prinsip bagi perdamaian yang adil dan lestari di Timur Tengah. Prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan tersebut adalah :

- (1) Penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki pada waktu pecah perang tahun 1967.
- (2) Penghentian semua tuntutan atau keadaan bermusuhan dan penghormatan serta pengakuan terhadap kedaulatan, kesatuan wilayah dan kemerdekaan politik dari setiap Negara diwilayah tersebut, dan hak mereka untuk hidup dalam damai didalam batas-batas wilayah yang terjamin dan diakui, bebas dari ancaman atau tindakan kekerasan.

Kemudian Desember 1991, Majelis Umum menegaskan kembali seperangkat prinsip untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, yaitu :

- (1) Mundurnya Israel dari wilayah yang diduduki sejak 1967 termasuk Jerusalem, dan wilayah Arab lainnya yang diduduki.
- (2) Dibongkarnya pemukiman Israel di wilayah-wilayah tersebut.
- (3) Jaminan keamanan untuk semua Negara di wilayah terbut dalam batas-batas wilayah yang aman dan diakui secara internasional.
- (4) Penyelesaian masalah pegungsi Palestina sesuai dengan resolusi-resolusi Majelis Umum.

Jaminan kebebasan untuk memperoleh akses ke tempat-tempat suci, bangunan dan tempat-tempat keagamaan. Upaya-upaya perdamaian selanjutnya adalah perjanjian damai Camp David tahun 1979, Konferensi Madrid 30-31 Oktober 1991, Konferensi Washington 4 Desember 1991, Gaza Ariha 13 September 1993, Oslo 19 Agustus 1993, kesepakatan Kairo 4 Mei 1994, pergerakan Taba 28 Desember 1995, perjanjian Wye Plantation 24 Oktober 1998, dan catatan Syerm ash-Shekh 4 September 1999.

Pada tanggal 30 Oktober 1991 telah dilaksanakan Konferensi Madri. Perundingan ini akan berlangsung dalam tiga fase yang disponsori bersama AS dan US. Fase pertama adalah fase pembukaan, serimonial, dan pidato-pidato dari pemimpin Negara yang terlibat. Fase kedua adalah fase terpenting perundingan langsung Arab – Israel, yang akan terdiri tiga set perundingan bilateral yang parallel: Israel – Libanon, Israel – Syiria, dan Israel – Palestina 9-18 Desember 1991. Sedangkan fase ketiga dan terakhir, fase multilateral Arab – Israel yang akan membahas masalah regional Timur Tengah, seperti pengendalian senjata, masalah air dan sebagainya.

Isu pokok yang dibangun dalam perundingan ini, antara lain mencapai perundingan tentang “pemerintahan sementara” Palestina di Westbank dan Gaza yang berlangsung selama 5 tahun. Pada permulaan tahun tiga, dilakukan perundingan untuk menentukan status final dari Westbank dan Gaza atas dasar resolusi 242.

Pada tanggal 13 September 1993 perjanjian Oslo dilaksanakan, yang dikenal

deklarasi prinsip-prinsip antara Palestina (PLO) dengan Israel yang ditandatangani di Washington. Yang disaksikan oleh presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Yasser Arafat (PLO) dari Palestina dan Yitzak Rabin dari Israel. Dalam implementasi kesepakatan Oslo I di Washington 1993 yang akan menyerahkan Jalur Gaza dan kota Jericho kepada Palestina, kesepakatan Oslo II bulan November 1996 yang akan menyerahkan Tepi Barat (kota Hebron) kepada Palestina, kesepakatan Oslo III tanggal 4 Mei 1999 akan menyerahkan Jerusalem Timur dan pemukiman Yahudi serta pemulangan pegungsi Palestina kepada Palestina. Setelah berakhirnya putaran Oslo, tanggal 4 Mei 1999 yang seharusnya ditandai dengan berdirinya Negara Palestina. Tapi justru menimbulkan penolakan dari pihak Israel. Karena Israel melihat kesepakatan Oslo hanya mekanisme baru konflik daripada kerangka penyelesaian. Upaya perundingan yang telah dilaksanakan ini pada prinsipnya mencari titik temu dari berbagai kecenderungan yang dimiliki kedua pihak.

Dan pada tanggal 24 Oktober 1998 perjanjian damai Wye River dilaksanakan. Adian Husaini (2002:126) mengatakan bahwa dalam perjanjian itu disebutkan Israel akan mundur dari 13 persen wilayah Tepi Barat, yaitu akan menarik tentaranya dalam tiga tahap, akan melepas 750 tahanan Palestina dalam tiga tahap. Sebaliknya, Palestina diharuskan memerangi kelompok radikal anti-Israel dan mencabut klausul anti-Israel dalam Piagam Nasional Palestina.

Upaya-upaya perdamaian yang terus didorong oleh berbagai Negara belum membuahkan hasil yang positif. Namun setidaknya ada tanggungjawab moral yang senantiasa diberikan. Maka ada sementara kalangan yang pesimis bahwa perdamaian Timur Tengah akan terwujud. Ada juga yang optimis bahwa perdamaian akan terwujud, mengingat semua yang terlibat sebenarnya menginginkan suatu perdamaian. Hanya saja tidak akan segera tercapai. Jalan yang ditempuh masih sangat panjang dan perlu pengorbanan dan perjuangan.

Dari kedua anggapan diatas, tampaknya anggapan yang kedua akan menjadi kenyataan. Dunia telah mempertontonkan bagaimana Tembok Berli yang begitu kokoh dan kedua Jerman menjadi satu Negara. Tidak itu saja, Uni Sovyet yang dianggap Negara adidaya akhirnya rontok dan bubar.

### **Fatwa Penting Perjanjian Damai Oslo 1993**

- a. Membentuk Otoritas Pemerintahan Sendiri dan Dewan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Perundingan Palestina – Israel, Yasser Arafat memberikan pengakuan bahwa rakyat Palestina menginginkan kemerdekaan Negara. Tapi pernyataan ini belum menjelaskan kepastian dan bentuk Negara seperti apa. Seakan-akan pernyataan ini hanya menarik simpati dalam mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok. Karena sejak awal dalam perundingan itu Yitzak Rabin telah menegaskan bahwa yang akan bermarkas di Jalur Gaza dan Jericho di Tepi Barat adalah sekedar pemerintahan administrative, dan bukannya kemerdekaan Negara Palestina. Walaupun hanya bersifat pemerintah administrative yang diberikan oleh Israel, tapi ini semua tidak menjadi bukti. Justru pembantaian dan pengusuran warga yang terus berlangsung. Sehingga pemerintahan administrative itu hanya perpanjangan tangan pemerintahan Israel.

- b. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang diharapkan oleh rakyat Palestina agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ternyata selalu mengalami penundaan. dan ini selalu dimulai

dari pihak Israel. Memang para pengamat telah memprediksikan bahwa Israel akan selalu ingin mengagalkan setiap kesepakatan. Hal ini dilakukan agar sampai batas akhir kesepakatan pemilu itu tidak dilaksanakan. Ini terbukti penyelegaraan pemilu yang sudah dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 1994, baru dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1996. Akibat penundaan ini, peristiwa pembantaian terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh kedua pihak. Padahal yang diharapkan dari pemilu ini adalah agar rakyat Palestina dapat menentukan hak dan nasibnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

c. Yurisdiksi Dewan.

Batas kekuasaan dewan dalam menentukan wilayah yang disepakati itu tidak sepenuhnya harus tanggungjawab dewan atau pemerintahan administrative. Tapi harus mendapat persetujuan pemerintahan Israel, apabila ada hal-hal yang menyangkut keputusan dewan. Ini yang kemudian menjadi tidak adil, karena nasib rakyat Palestina biarlah mereka yang menentukan sendiri. Kenapa harus ada pihak lain (Israel). Padahal wilayah itu milik rakyat Palestina.

d. Penarikan Tentara Israel dari Jalur Gaza

Dalam lima tahun kesepakatan Oslo, Palestina hanya mampu menguasai secara bersama dengan Israel 27 persen wilayah Tepi Barat (wilayah kategori B) dari 5.800 km persegi luas Tepi Barat, dan menguasai penuh 60 persen Jalur Gaza yang hanya memiliki luas 360 km persegi. Padahal rakyat Palestina berharap agar wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat harus mendapat 90 persen (Adian Husaini, 2002:118). Dalam waktu yang bersamaan ternyata pembangunan pemukiman Yahudi terus dilaksanakan dan ditingkatkan menjadi 25 persen. Sehingga seharusnya militer yang berada dalam wilayah Palestina harus ditarik sebelum penyelenggaraan pemilihan dewan otonomi Palestina ternyata tidak terjadi. Karena dengan alasan keamanan para pemukin Yahudi

## KESIMPULAN

Sejak awal telah diduga bahwa kesepakatan apapun yang dilaksanakan dengan pihak Israel akan selalu dilanggar. Ini yang kemudian oleh faksi-faksi perlawanan Palestina yaitu Hamas dan Jihad Islam tidak mau lagi melakukan perundingan dengan pihak Israel. Karena perundingan dengan Israel yang telah dimulai pada tahun 1979 dengan nama Camp David, Konferensi Madrid 1991, Konferensi Washintong 1991, Gaza Ariha 1993, bahkan perjanjian Oslo 1993 tidak dapat diimplemensikan berdasarkan butir-butir kesepakatan yang ada. Hal ini terbukti pula dengan adanya berbagai perjanjian damai pasca Oslo 1993, seperti kesepakatan Kairo 1994, kesepakatan Taba 1995, perjanjian Wye River 1998, perjanjian Syerm ash-Shekh 1999, sampai pada peta jalan damai sekarang ini tidak memberikan titik terang pada proses penyelesaian konflik Paletina - Israel. Sementara itu, pembangunan pemukiman Yahudi terus ditingkatkan, pembantaian warga Palestina terus terjadi, pengungsi yang tidak tau nasibnya seperti apa, negara yang dijanjikan tidak kunjung ada, status Kota Jerusalem seperti apa dan sebagainya menjadi misteri. Persolan ini juga diperparah dengan peran PBB dan OKI sebagai mediasi penyelesaian konflik antar bangsa yang tidak jelas. Hal ini diindikasikan dengan munculnya berbagai resolusi yang tidak berpengaruh pada penyelesaian atau konsensus tersebut. Artinya bahwa setiap resolusi yang dikeluarkan, baik oleh PBB maupun OKI tidak disertai dengan tindakan konkrit dilapangan, baik dalam bentuk aksi militer atau pasukan penjaga perdamaian yang dihormati semua

pihak, terutama pihak-pihak yang bertikai. Kondisi dan peran PBB serta OKI yang demikian lemah, senantiasa akan memberikan peluang pada Israel untuk membantai rakyat Palestina. Padahal telah jelas bahwa PBB sebagai penjaga perdamaian dunia ternyata pada hakekatnya telah beralih fungsi menjadi pembantai dan pelindung Imperialisme. Bahwa hasil penelitian ini menekankan bahwa persoalan Palestina – Israel telah memakan waktu yang cukup lama dan terkesan PBB dan OKI terus membiarkan konflik ini terus berlangsung. Bahwa berbagai pihak sudah menyerukan agar konflik ini diselesaikan secara damai tanpa kekerasan dengan jalan perundingan. Konflik Palestina – Israel merupakan tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan, semua resolusi-resolusi dan kesepakatan damai yang pernah dibuat oleh kedua belah pihak tidak berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor internal, yaitu tokoh dan kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam sistem sosial dan politik, serta persatuan negara-negara Arab yang hilang. Dan faktor eksternal, yaitu negara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Beberapa catatan penting tentang resolusi konflik antara Palestina dan Israel adalah 1). Peran PBB dan OKI harus tegas dalam menyikapi konflik Palestina – Israel, setelah dilakukan revitalisasi dan refungsionalisasi ditubuh kedua badan dunia tersebut, 2). Perlu adanya komitmen yang kuat dari negara-negara Islam (OKI), terutama negara-negara Arab untuk membantu penyelesaian konflik Palestina – Israel tanpa ada niat untuk meghianati perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kembali wilayah teritorial mereka dari Israel, 3). Dan perlu adanya komitmen yang kuat antara Palestinan-Israel-Amerika dan negara-negara tetangga untuk menjaga setiap perjanjian yang sedang berlangsung dan menerapkan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggaran butir-butir perjanjian yang telah disepakati.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Al-Qardhawi, DR Yusuf, 1996, Mengapa Kita Kalah di Palestina, Pustaka, Bandung Dunia Baru, Pustaka Hidayah, Jakarta
- [2] Husaini, Adian, 2002, Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris Yang Pragmatis? Pustaka Progresif, Jakarta
- [3] Holsti, K. J, 1987, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, Bina Cipta, Bandung
- [4] Maulani, Z. A, 2002, Zionisme: Gerakan Penaklukan Dunia, Dasetra, Jakarta
- [5] Obert, Jonh Voll. 1997, "Islam Continuity and Change in the Modern World". Terjemah: Ajat Sudrajat. Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan Dunia Modern. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- [6] Rahman, Musthafa Abd, 2002, Dilema Israel, Antara Krisis Politik dan Perdamaian, Kompas, Jakarta
- [7] -----, 2002, Jejak-Jejak Juang Palestina dari Oslo Hingga Intifadah Al-Aqsa, Buku Kompas, Jakarta
- [8] Rudi, T May, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, PT Rafika Aditama, Bandung
- [9] Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Ind: CCSS dan Pustaka Pelajar.
- [10] Yusuf, Almuzammil, 2001, Terorisme Israel: Membedah Paradigma dan Strategi Terorisme Zionisme, Comes, Bandung
- [11] www. Oslo.aggrement.com. 2003
- [12] <http://ekomarhaendy.wordpress.com/2009/02/13/> diakses tanggal 22/11/2012)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN